

IMPLEMENTASI PROGRAM *FOOD ESTATE* DI DESA BAHOUR TENGAH, KECAMATAN KAHAYAN KUALA KABUPATEN PULANG PISAU

Ode Mahardhika¹, Nurul Azkar², Erma Ariyani³
Program Administrasi Publik, FISIP, Universitas Lambung Mangkurat^{1,2,3}
odemahardhika2@gmail.com

Abstract

Food estate is a national program belonging to President Joko Widodo, one of which was launched in Central Kalimantan, precisely in the districts of Kapuas, Pulang Pisau and Gunung Mas. This program is similar to the PLG program under President Soeharto but failed due to lack of attention to local technical, environmental, social, economic and cultural aspects. Then, did this food estate program learn from the failure of the PLG program because it collided with the socio-cultural system of the local community? This basic question has inspired research on the Implementation of Food Estate Program Policies with a locus in Bahaur Tengah Village, Kahayan Kuala District, Pulang Pisau Regency. This study uses a constructivist view because it relies as much as possible on the participants' views about the current situation. The main instrument is the researcher himself who goes to the field to interact with the local community. The results showed that the food estate program was repeating the mistakes of the New Order PLG program. Social, cultural, technical, economic and institutional aspects of the local economy are neglected. This is because the food estate program is centralized in nature, does not provide space for the community, especially farmers who better understand local conditions to provide suggestions and input for program improvement. For this reason, it is recommended that the government make policy changes, especially in implementing policies to be more adaptive to local conditions.

Keywords: *Implementation, Food Estate, Centralized, Local Conditions.*

Abstrak

Food Estate adalah program nasional milik Presiden Joko Widodo yang dicanangkan salah satunya di Kalimantan Tengah tepatnya di Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau, dan Gunung Mas. Program ini mirip dengan program PLG pada jaman Presiden Soeharto tetapi mengalami kegagalan akibat kurangnya perhatian terhadap aspek teknis, lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya setempat. Lalu, apakah program *Food Estate* ini belajar dari kegagalan program PLG karena berbenturan dengan sistem sosio-kultural masyarakat setempat? Pertanyaan mendasar inilah yang menjadi inspirasi penelitian tentang Implementasi Kebijakan Program *Food Estate* dengan lokus di Desa Bahaur Tengah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau. Penelitian ini menggunakan pandangan konstruktivisme karena mengandalkan sebanyak mungkin pandangan partisipan tentang situasi yang sedang terjadi. Instrumen utamanya adalah peneliti sendiri yang turun ke lapangan berinteraksi dengan masyarakat setempat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program *Food Estate* ternyata mengulangi kesalahan program PLG Orde Baru. Aspek-aspek sosial, budaya, teknis, ekonomi, dan kelembagaan ekonomi setempat terabaikan. Hal tersebut disebabkan program *Food Estate* bersifat sentralistik, tidak memberi ruang bagi masyarakat, khususnya para petani yang lebih memahami kondisi lokal untuk memberikan saran dan masukan guna perbaikan program. Untuk itu disarankan agar pemerintah melakukan perubahan kebijakan, khususnya dalam implementasi kebijakan untuk lebih adaptif dengan kondisi lokal.

Kata kunci: *Implementasi, Food Estate, Sentralistik, Kondisi Lokal.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang baru merdeka pasca Perang Dunia II, menghadapi masalah kemiskinan dalam berbagai aspek kehidupan (ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain-lain). Oleh sebab itu, setelah berakhirnya masa revolusi kemerdekaan (1945-1949), rezim Orde Lama merancang berbagai program pembangunan, termasuk program pembangunan sektor pertanian dalam bentuk *Kasimo Welfare Plan* (Tjokrowinoto, 1996). Program ini mengidentikkan pembangunan desa dengan pembangunan pertanian. Strategi yang digunakan dikenal sebagai *olie vlek* atau percikan minyak, yakni mengadakan *demonstration plot* untuk memberikan contoh pertanian yang baik dengan harapan teknik tersebut dapat menyebar ke desa-desa sekitarnya. Namun, kebijakan pembangunan dengan strategi percikan minyak tersebut tidak terlaksana dengan baik karena pemerintah sendiri kekurangan dana dan tenaga ahli.

Rezim Orde Baru yang mewarisi kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang carut marut berusaha membangun bangsa melalui sistem pemerintahan terpusat (sentralistik) di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Dengan sistem pemerintahan yang sentralistik, rezim Orde Baru berhasil menciptakan stabilitas nasional melalui agenda penyelamatan negara (Juli-Desember 1966), rehabilitasi (Januari-Juni 1967), masa konsolidasi (Juli-Desember 1967), dan masa stabilitas (Januari-Juni 1968). Setelah itu, sejak awal tahun 1970-an diperkenalkan program revolusi hijau (*green revolution*), yakni program pembangunan pertanian secara besar-besaran. Hasilnya, pada tahun 1984 Indonesia berhasil mencapai

swasembada pangan, yakni berhasil memproduksi sebanyak 27 juta ton beras, sementara kebutuhan dalam negeri saat itu sekitar 25 juta ton. Jadi, Indonesia mengalami surplus beras sebanyak 2 juta ton, dan karenanya berani menyumbang 100.000 ton untuk korban kelaparan di beberapa negara Afrika (Aditiasari, detikFinance, 23 November 2018).

Keadaan itu tidak berlangsung lama, karena pada tahun 1990 Indonesia kembali mengimpor beras. Oleh sebab itu, pada tahun 1995, rezim Orde Baru membuat kebijakan dalam bentuk program pembukaan lahan gambut sejuta hektar dengan mencetak sawah di Kalimantan Tengah guna meraih kembali swasembada pangan (BBCINDONESIA.com, 16 Februari 2007). Akan tetapi, program yang sangat mulia itu tidak berjalan sesuai kehendak semula, sebagian orang mengatakannya gagal, namun yang jelas program ambisius tersebut tidak pernah lagi terdengar di permukaan seiring lengsernya Pak Harto tahun 1998 sebagai Presiden (HIMAINDONESIA.com, 8 Oktober 2017).

Berbagai analisis tentang kegagalan program satu juta hektar lahan gambut terdahulu, Suriadikarta (2009) menyatakan kegagalan PLG antara lain disebabkan kurangnya perhatian terhadap aspek teknis, lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya, mulai dari proses perencanaan sampai pelaksanaan. Senada dengan pendapat ini, Iff (2009) menyatakan bahwa "...kebutuhan komunitas ditentukan oleh orang lain seperti perencana, peneliti atau manajer yang melakukan beberapa bentuk 'penilaian kebutuhan', merupakan salah satu penyebab kegagalan program pembangunan".

Pernyataan ini dianggap tepat mengingat masyarakat di pedesaan Kalimantan Tengah umumnya masih menjunjung kultur/adat dan kebiasaan-kebiasaan mereka.

Pentingnya pemahaman terhadap kondisi sosio-kultural setempat juga ditemukan dalam hasil kajian Roosganda Elizabeth (2007) dengan judul “Penguatan dan Pemberdayaan Kelembagaan Petani Mendukung Pengembangan Agribisnis Kedelai”. Hasil kajian yang dimuat dalam jurnal Agribisnis dan Sosial Ekonomi Pertanian UNPAD mengusulkan sebuah rancangan kebijakan yang salah satunya berbunyi, “...mempertimbangkan indigenous knowledge (kearifan lokal) dan local knowledge (pengetahuan lokal) dalam pengembangan kelembagaan (kelompok tani)”.

Walaupun program pengembangan lahan satu juta hektar yang digagas rezim Orde Baru gagal mencapai tujuannya, pada 27 Juni 2020 Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo kembali membuat kebijakan bidang pangan berskala nasional yang diberi nama program “*Food Estate*”. Menariknya, program tersebut memanfaatkan 600 ribu hektar lahan sisa program sejuta hektar lahan gambut dimasa Orde Baru yang gagal itu” (Hidranto, Indonesia.go.id 2020).

Program *Food Estate* ini berlokasi di tiga kabupaten yakni Kabupaten Kapuas, Gunung Mas, dan Pulang Pisau. Pencanangannya dilakukan Presiden Joko Widodo di Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuan program *Food Estate* sudah jelas yakni mewujudkan ketahanan pangan nasional dan memastikan pemerataan pembangunan pertanian tanaman pangan di seluruh wilayah Indonesia yang daerahnya berpotensi memproduksi tanaman pangan.

Apabila program yang tak kalah ambisiusnya ini berhasil, akan menjadikan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Namun, “...jika materi kebijakan publik senantiasa tidak sejalan atau bertentangan dengan nilai-

nilai budaya pada kelompok masyarakat, dapat kita katakan akan menghambat implementasi kebijakan publik tersebut” (Makmur & Thahier, 2016).

Penulis menduga apabila program yang ambisius ini mengabaikan faktor lingkungan apalagi menyangkut budaya maka, tidak menutup kemungkinan program *Food Estate* ini akan mengalami kegagalan yang sama seperti yang terjadi dengan pendahulunya (PLG).

Belajar dari kegagalan program pengembangan lahan gambut satu juta hektar karena tidak bersesuaian dengan sistem sosio-kultural masyarakat setempat. Lalu, apakah program *Food Estate* ini bersesuaian dengan sistem sosio-kultural masyarakat setempat? Pertanyaan mendasar inilah yang menjadi dasar penelitian tentang Implementasi Program *Food Estate*, dengan mengambil lokasi di Desa Bahaur Tengah Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.

Bertolak dari latar belakang pemikiran di atas, masalah yang hendak dianalisis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan *Food Estate* di Kalimantan Tengah khususnya di desa Bahaur Tengah?

2. Bagaimana implementasi kebijakan program *Food Estate* dalam konteks lingkungan?

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah Kualitatif Deskriptif dengan tipe penelitian lapangan (*field*) (Creswell, 2014; Dharma, 2008). Penelitian ini menggunakan pandangan konstruktivisme untuk mendalami pemahaman soal sosio-kultural dengan mengandalkan sebanyak mungkin pandangan partisipan tentang situasi yang sedang dipelajari.

Menurut Hikmawati (2018), data penelitian dibagi menjadi data Primer dan Sekunder. Data sekunder yang dikumpulkan antara lain berkenaan dengan program *food estate* di wilayah Pulang Pisau. Data diperoleh melalui studi dokumenter pada Dinas

Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya diidentifikasi dua diantaranya desa Bahaur Tengah dan Belanti Siam yang menjadi lokasi peningkatan indeks tanam.

Setelah teridentifikasi lokasi desa yang ditingkatkan indeks tanam, kemudian dikumpulkan data primer menggunakan teknik:

- a. Wawancara mendalam untuk menggali data tentang teknik bertanam sebelum dan sesudah program *food estate* serta kendala yang dialami oleh kedua desa tersebut. Wawancara mendalam dengan petani yang ada di lahan sawah, baik yang masih berprofesi maupun yang merangkap kerja di staf desa terutama di Bahaur Tengah, dan diskusi dengan koordinator Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Kahayan Kuala.
- b. Diskusi kelompok terfokus bertujuan mendiskusikan berbagai masalah dan harapan petani terkait program *food estate*. Diskusi dilakukan secara informal di sembarang tempat, seperti di pinggir lahan sawah petani.
- c. Observasi untuk melihat secara langsung kegiatan bertani masyarakat di Desa Bahaur Tengah dan kondisi fisik lingkungan alamnya.

Sesuai dengan pandangan dunia konstruktivisme, sifat penelitian kualitatif dengan memanfaatkan pandangan partisipan, data yang diperoleh dari berbagai teknik di atas dianalisis menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles & Huberman (2014). Untuk menguji keabsahan data dilakukan triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, dan analisis kasus negatif/kasus pendamping (Desa Belanti Siam).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Food Estate di Bahaur Tengah

Pertama, Desa Bahaur Tengah terpilih sebagai lokasi pelaksanaan program *Food Estate* di Provinsi Kalimantan Tengah karena 90% dari jumlah penduduk desa Bahaur Tengah rata-rata berprofesi sebagai petani. Kedua, kunjungan Tim Sekretariat Kabinet

bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Pertanian Kegiatan Intensifikasi Lahan, Ekstensifikasi Lahan, dan *Survey Investigasi Design* (SID) menghasilkan *Area of Interest*, yang merupakan data luas lahan yang akan dibangun di dua kabupaten yaitu Kapuas sebesar 20.000 ha dan Pulang Pisau 10.000 ha dengan luas keseluruhan 30.000 ha (DISKOMINFO PROV.KALTENG, 2021).

Terakhir, terpilihnya kembali Kalimantan Tengah adalah untuk memanfaatkan *ex-PLG* dengan kondisi pertanian di lahan rawa diharapkan mampu untuk meningkatkan produksi dan pendapatan daerah serta terwujudnya Kelembagaan korporasi petani yang memiliki orientasi bisnis dan berdaya saing (DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN & TENGAH, 2021).

Untuk mewujudkan hal tersebut, berikut adalah tujuan dari program *food estate* di Kalimantan Tengah:

1. Membangun kawasan *food estate* melalui pengembangan komoditas utama (padi), hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan yang berdaya saing, ramah lingkungan dan modern per cluster ± 1.000 ha.
2. Mendorong sinergitas dengan *stakeholders* dalam pengembangan *food estate*
3. Mendorong terbentuknya kelembagaan petani berbasis korporasi.
4. Pengelolaan ALSINTAN secara Brigade per cluster ± 1.000 ha.

Inilah yang menjadi acuan bagi peneliti untuk melakukan analisis apakah program *food estate* di Bahaur Tengah ini mengalami kegagalan atau mendulang keberhasilan.

1. Analisis Kegagalan Program *Food Estate*

Masruddin selaku sekretaris desa Bahaur Tengah bersama Bulkani salah satu petani yang bekerja sebagai staf desa Bahaur Tengah menjelaskan bahwa cara bertani mereka masih menggunakan sistem tradisional (manugal), yaitu:

Cara bertani kami masih manual tradisional yaitu dengan sistem tugal/manugal. Sebelum penanaman, petani akan manugal pada bulan 1-2 dan bulan 3 tanahnya dilapak, lalu penanaman dimulai pada bulan April hingga panennya pada bulan Agustus-September.

Berbeda dengan tradisi masyarakat Bahaur Tengah, *food estate* memperkenalkan program untuk meningkatkan indeks tanam dengan menggunakan teknik modern berupa tanam sistem tabur, salah satu petani mengemukakan:

Sistem tanamnya langsung ditabur oleh padi jenis 100 hari tegasan dari program. Sudah mereka uji coba di sini termasuk di hilir juga, gak ada yang bisa tumbuh dengan baik. Kalau kita tabur, waktu air pasang bibitnya hanyut, ditambah lagi dengan hama seperti walangsangit, burung, dan tikus. Jadi gagal total, sumber utamanya air pasang, waktu penyemaian bibitnya langsung hilang.

Sebelum program tersebut diterapkan di Bahaur Tengah, petani ketika itu sudah panen padi lokal pada bulan September. Program tersebut datang langsung meminta kepada petani untuk melakukan penanaman pada bulan Oktober dan direncanakan akan panen pada bulan Maret. Tetapi karena biasanya pada akhir tahun terjadi banjir, akhirnya penanaman tersebut gagal, Supriyono selaku Koordinator Balai Penyuluh Pertanian, mengemukakan:

Karena kegiatannya sudah dilakukan pada bulan November-Desember, begitu ditabur kena banjir langsung habis. Kalau mau bikin sistem tabur, paling tidak menanamnya di bulan September, jadi padi pasti tumbuh.

Lalu, Masruddin dan Bulkani menyampaikan keluhan yang dirasakan dari program *food estate* dan menyampaikan harapan dari program ini, sebagai berikut:

Kadang-kadang pupuk, obat-obatan yang dibantu tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh petani. Biasanya petani menggunakan pupuk A, tetapi yang datang tidak sesuai, malah gak dipakai oleh petani lantaran beda pupuk. Kalau ingin membantu, tolong didengar masyarakatnya mau minta pupuk apa, itu yang ditanggapi, lalu traktor ditambah. Jadi, pupuk yang dikasih dari

program *food estate* petani kurang paham penggunaannya, contohnya kapur, itu sama sekali enggak dipakai oleh petani.

Hasil tersebut menunjukkan program *food estate* ini tidak cocok dengan budaya tani masyarakat Bahaur Tengah. Ketidakcocokan ini menunjukkan program *food estate* tidak adaptif terhadap kondisi lokal dan lingkungan alam Kalimantan. Ketidakcocokan antara pemerintah dan masyarakat yang dijadikan sebagai objek, karena menurut Klein (2007) pemerintah "...memaksakan pandangan orang lain tentang pembangunan yang tepat dan menghalangi hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri dan melanggengkan struktur penindasan dan kerugian". Sejalan dengan itu, Mar'ie (2014) mengatakan "...apabila perubahan tersebut terlalu jauh dengan suasana serta adat kebiasaan yang lama, maka sikap terhadap perubahan itu akan terjadi penolakan".

Tidak hanya sampai di situ, data yang penulis kumpulkan dari Bahaur Tengah akan disandingkan dengan data dari desa Belanti Siam untuk memvalidasi data. Untuk itu, Penulis dengan tim melakukan wawancara dengan Sukanto dan Budi selaku petani Belanti Siam yang mengungkapkan program *food estate* di Belanti Siam juga mengalami gagal panen, berikut datanya:

Hasil panennya tidak maksimal, gagal total. Karena yang jadi masalah teori Jawa dipakai ke Kalimantan itu gak nyambung. Belanti Siam sistemnya 2 kali panen dalam setahun, lalu program ini kemaren untuk meningkatkan indeks tanam, mengharuskan 3 kali panen setahun. Sekarang sudah 2 kali aja gulur tikar, ngapain dilanjut. Soalnya kalau lahan *dizone* terus, tanahnya semakin dalam. Akhirnya kembali ke asal, tanam siam, panen 2 kali setahun (data diambil di bulan November, waktu persiapan petani untuk menyiapkan lahan kembali seperti semula).

Pak Sukanto memberikan lagi pernyataan soal penentuan waktu yang salah hingga padi habis dihantam tikus pada saat penanaman, Sukanto mengungkapkan:

Duh kemaren yang pertama, bulan 10 disuruh nanam, padahal bulan 11 ini keluarnya tikus, sudah rumus itu. Contoh,

kalau di sini biasanya bulan 11 Akhir orang mulai tanam. Nanti kalau nanamnya bulan 12 panennya bulan 4, kan begitu. Jadi nanam lagi nanti panennya bulan 8 bulan 9, ya biasanya seperti itu orang sini. Soalnya hitungan 4 bulan panen. Saya heran itu yang ahlinya tikus, dari mulai bunting harusnya sudah tahu. Kalau mereka itu memang tahu. Ini, sudah tahu musimnya tikus malah suruh nanam.

Data selanjutnya dari Istri Pak Sukanto yang mengatakan kegagalan ini juga disebabkan oleh sistem tanam yang ditegas oleh *food estate* adalah sistem tabur, beliau mengungkapkan:

Kalau menurut Program, sistem ditabur. Dari segi penghasiian itu kurang, apalagi kalau ada angin sedikit, padinya bakal ambruk, seperti padi saya waktu itu, padahal sudah mau panen, karena hembusan angin ya gagal.

Dari data yang penulis himpun dengan membandingkan desa Bahaur Tengah dan desa Belanti Siam, kesamaan kegagalan tersebut terletak pada sistem tanam tabur yang rentan sekali gagal akibat lingkungan alam Kalimantan, baik itu air pasang, maupun angin, dan rentan dihantam hama seperti tikus, burung, dan walangsangit.

Kegagalan Pemerintah Memahami Desa

Pada Implementasi Kebijakan, faktor lingkungan itu luar biasa pengaruhnya (Chambers, 1994; Elizabeth, 2007, 2019; Fakhsiannor, 2016; Kortjen & Carner, 1984; Lase, 2019; M. Kolawole, 2018; Makmur & Thahier, 2016; Swanson et al., 2001).

Memaksakan budaya tanam Jawa ke Kalimantan adalah sesuatu yang mustahil bukan tanpa sebab. Lingkungan yang ada di Jawa berbeda 180° dengan yang ada di Kalimantan Tengah, dari tata lahannya, budaya, sosial ekonominya, sampai alamnya. Pernyataan ini juga didukung oleh M. Kolawole (2018), Riggs, (1986), Sinkule dan Ortolano (dalam Swanson et al (2001) yang mengatakan bahwa lingkungan sangat penting untuk diperhatikan pada saat menyusun perumusan dan implementasi kebijakan publik, karena penguasaan lingkungan

kebijakan serta pemahaman tentang budaya menjadi faktor keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan kebijakan (Makmur & Thahier, 2016; Fakhsiannor, 2016; Ite, 2009; M. Kolawole, 2018; Swanson et al., 2001).

Model Implementasi kebijakan kebijakan dari Sinkule & Ortolano (dalam Swanson et al., 2001) terdapat tiga aktor yang berinteraksi, yaitu *implementating Authority, Stakeholders, and Rural Enterprises*. Pada program *food estate* tidak ditemukannya salah satu aktor yaitu *rural enterprises* atau dalam kasus ini disebut lumbung pangan, yang mana hal tersebut termasuk dalam salah satu tujuan dari program *food estate* di Kalimantan Tengah, yaitu mendorong terbentuknya kelembagaan petani berbasis korporasi. Kurangnya aktor tersebut berpengaruh pada keberhasilan program, dengan tidak adanya lumbung pangan/pengumpul untuk menampung hasil panen petani di Bahaur Tengah, menyebabkan hasil panen mereka hanya sebatas dijual ke sesama orang lokal atau dimakan pribadi.

Tujuan kedua yang tidak tercapai di desa Bahaur Tengah, yaitu pengelolaan Alsintan secara *Brigade*. Keberadaan sawah petani Bahaur Tengah yang terletak di seberang desa menjadi penghambat untuk distribusi Alsintan bagi petani. Walaupun kebutuhan petani ingin diperbanyak traktor, tetapi Alsintan yang berupa traktor maupun *combine harvester* tidak bisa dibawa dengan menggunakan alat transpostasi air seperti kelotok/*long boat*. Inilah masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu, bahwa sebenarnya keberadaan *rural enterprises* sangat berdampak pada pendapatan petani lokal (Swanson et al., 2001). Selain faktor budaya, pemahaman lingkungan fisik desa juga menjadi faktor program tersebut dapat berjalan dengan baik atau sebaliknya.

Inilah yang dikatakan oleh M. Kolawole (2018) bahwa pemahaman yang buruk tentang lingkungan kebijakan publik dan ketidakmampuan untuk mengatasi tantangan implementasi kebijakan

meningkatkan biaya tata kelola, dan mengalihkan investor.

Fakta bahwa lahan sawah desa Bahaur Tengah yang harus menyeberangi sungai adalah masalah utama yang harus diselesaikan apabila ingin memberikan bantuan seperti traktor. Analisis mengenai lingkungan seharusnya sudah memprediksi hal tersebut sehingga tidak akan menjadi masalah. Namun, masalah yang tidak dapat diprediksi biasanya karena implementasinya tidak mengajak masyarakat untuk berkomunikasi membahas bersama. Inilah yang disebut dengan kebijakan sentralistik.

Kebijakan yang sentralistik cenderung mengalami kegagalan pada saat implementasi karena yang terjadi di lapangan penerapan program sangat lekat dengan sifat kolonialisme. Hal ini diperkuat dari analisis Suriadikarta (2009) dalam menganalisis kegagalan PLG bahwa kebijakan yang bersifat sentralistik mengakibatkan program tersebut mengalami kegagalan karena tidak mengindahkan budaya lokal dan lingkungan lokal yang sangat penting untuk dipertimbangkan.

Dari hasil analisis di atas, penulis katakan kebijakan tidak diterapkan di ruang hampa, tetapi berada di dalam sebuah lingkungan yang dapat mempengaruhi keberhasilan. Karena, materi kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya kelompok masyarakat, akan menghambat implementasi kebijakan tersebut (Chamber, 1996; Fakhriannor, 2016; Ife, 2009; Ife & Tesoriero, 2016; Korten & Carner, 1984; M. Kolawole, 2018; Makmur & Thahier, 2016; Mar'ie, 2014; Swanson et al., 2001).

KESIMPULAN

Program *food estate* di desa Bahaur Tengah telah mengulangi kegagalan yang serupa dengan pendahulunya, karena program ini tidak belajar dari masa lalu, tidak matang secara formulasi, dan beberapa tujuan dari *food estate* tidak tercapai sepenuhnya. Jadi, ketika diimplementasikan banyak mengalami

kendala-kendala yang tidak diprediksi pada saat proses formulasi.

Dari sinilah ilmu Administrasi Publik dapat mengambil perannya, yakni bagaimana pemerintah membawa program ini ke tengah masyarakat melalui pendekatan kultur, sehingga program *food estate* versi presiden Joko Widodo ini tidak akan mengalami nasib yang sama dengan program lahan gambut sejuta hektar milik Presiden Soeharto di era Orde Baru yang gegap gempita itu namun akhirnya kandas di tengah jalan. Karena bagaimanapun, masyarakatlah yang paling mengetahui masalah lingkungan, bukan para ahli yang merumuskan kebijakan, kita ajak mereka berpartisipasi aktif dalam membangun desa, dan saling menghargai pengetahuan, bukan saling memaksa pengetahuan, tetapi agar kita mengerti bagaimana cara berpikir masyarakat yang kemudian akan mensukseskan program kedepannya.

Berdasarkan tujuan *food estate* di Kalimantan Tengah, yang harus diselesaikan dahulu di desa Bahaur Tengah sebagai berikut:

Kebutuhan akan koperasi desa dalam hal ini lumbung pangan harus terlebih dahulu dibangun bagi masyarakat desa Bahaur Tengah yang nanti akan berperan meningkatkan pendapatan ekonomi petani.

Kendala petani ketika menerima bantuan Alsintan terletak pada keterbatasan akses menuju lahan sawah petani, yaitu kelotok/*long boat*. Ini salah satu masalah yang harus diselesaikan, yaitu bagaimananya caranya agar Alsintan tersebut dapat didistribusikan ke lahan sawah petani yang berada di seberang Desa Bahaur Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditiasari, D. (2018). *Fakta di Balik Swasembada Pangan Era Orde Baru* (2). detikFinance. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4314545/fakta-di-balik-swasembada-pangan-era-orde-baru-2>
- Agustian Hutriady. (2017). *Kebijakan Dan Tata Kelola Lahan Gambut*. HIMAINDONESIA.COM. <https://web.archive.org/web/201710081>

- 54425/http://himaindonesia.com/2016/09/19/kebijakan-dan-tata-kelola-lahan-gambut/
- Chamber, R. (1996). *Participatory Rural Appraisal* (P. A. Nugroho (ed.); Cetakan ke). KANISIUS.
- Chambers, R. (1994). Participatory rural appraisal (PRA): Challenges, potentials and paradigm. *World Development*, 22(10), 1437–1454. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(94\)90030-2](https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)90030-2)
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mix Methods Approaches* (4th ed., Vol. 4, Nomor 1). SAGE Publications, Inc.
- Dharma, S. (2008). *Pendekatan, jenis, dan metode penelitian pendidikan*.
- DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN, & TENGAH, P. K. (2021). *Food Estate kalteng Agustus 2021 edit13 oktober* (hal. 30). DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.
- DISKOMINFO PROV.KALTENG. (2021). *Pemprov Kalteng Berikan Paparan Teknis Program Food Estate*. <https://diskominfo.kalteng.go.id/berita/read/558/pemprov-kalteng-berikan-paparan-teknis-program-food-estate>
- Elizabeth, R. (2007). *Mendukung Pengembangan Agribisnis Kedelai*. 3(70), 165–173.
- Elizabeth, R. (2019). *Peningkatan partisipasi petani, pemberdayaan kelembagaan dan kearifan lokal mendukung ketahanan pangan berkelanjutan*. 4(2528), 48–61.
- Fakhsiannor. (2016). Analisis Faktor Ekologi terhadap Administrasi Negara dalam Transformasi Administrasi Modern. *As Siyasah*, 1(1), 42–48.
- Hidranto, F. (2020). *Food Estate, Lumbung Baru di Kalimantan Tengah*. <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/food-estate-lumbung-baru-di-kalimantan-tengah>
- Hikmawati, F. (2018). *METODOLOGI PENELITIAN* (cetakan ke). Rajawali Pers.
- Ife, J. (2009). *Human Rights from Below Achieving rights through community development*. United States of America by Cambridge University Press, New York.
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2016). *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi* (S. Manullang, N. Yakin, & M. Nursyahid (ed.); 3 ed.). Pustaka Pelajar.
- Klein, N. (2007). *The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism*, London: Allen Lane.
- Korten, D. C., & Carner, G. (1984). Planning Frameworks for People-Centered Development. In *People centered development: contribution toward theory and planning frameworks*. http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNAAR213.pdf
- Lase, F. (2019). Peranan Antropologi dalam Kajian Ilmu Administrasi Negara. *Warta Edisi* 60, April, 91–96.
- M. Kolawole, A. (2018). Ecological Determinants and Challenges of Public Policy Formulation and Implementation in Nigeria. *Journal of Social Science for Policy Implications*, 6(1), 1–9. <https://doi.org/10.15640/jsspi.v6n1a1>
- Makmur, & Thahier, R. (2016). *Konseptual & Kontekstual Administrasi dan Organisasi Terhadap Kebijakan Publik*. PT Refika Aditama.

- Mar'ie, R. (2014). *ANTROPOLOGI Sosial dan Pembangunan* (Cetakan 1). Pustaka Banua.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). An analytic approach for discovery. In *CEUR Workshop Proceedings* (Vol. 1304, hal. 89–92).
- Riggs, F. W. (1986). *Administrasi Pembangunan: Batas-Batas Strategi Pembangunan Kebijakan dan Pembaharuan Administrasi* (1 ed.). Rajawali.
- Suriadikarta, D. A. (2009). Pembelajaran dari kegagalan penanganan Kawasan PLG Sejuta Hektar Menuju Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan. *Pengembangan Inovasi Pertanian*, 2(984), 229–242. <http://pustaka.litbang.pertanian.go.id/publikasi/ip024091.pdf>
- Swanson, K. E., Kuhn, R. G., & Xu, W. (2001). Environmental policy implementation in rural China: A case study of Yuhang, Zhejiang. *Environmental Management*, 27(4), 481–491. <https://doi.org/10.1007/s002670010164>
- Tjokrowinoto, M. (1996). *Pembangunan : dilema dan tantangan* (1 ed.).
- Yusuf Arifin. (2007). *Proyek lahan gambut dihidupkan*. BBCINDONESIA.COM. http://www.bbc.co.uk/indonesian/indept/story/2007/02/printable/070215_lahangambut.shtml